

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya analisa terhadap dugaan pencemaran yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha/kegiatan melalui uji laboratorium lingkungan;
- b. bahwa laboratorium lingkungan merupakan salah satu asset kekayaan daerah dan apabila

dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH ATAS LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

- pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium lingkungan milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan atau asset Daerah.
  10. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
  11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
  12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  13. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  14. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas laboratorium lingkungan dipungut Retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ memakai laboratorium lingkungan.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji.
- (2) Besarnya tarif pemakaian /pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Pemeriksaan (Parameter Fisik, Kimia dan Biologi) sampel air		
No	Parameter Uji	Harga
1	Temperatur (suhu)	Rp 12.500,00/pengujian
2	pH (keasaman)	Rp 17.500,00/pengujian
3	TDS (Total padatan terlarut)	Rp 30.000,00/pengujian
4	TSS (Total padatan tersuspensi)	Rp 30.000,00/pengujian
5	DHL (Daya hantar listrik)	Rp 25.000,00/pengujian
6	DO (Oksigen terlarut)	Rp 42.500,00/pengujian
7	BOD <sub>5</sub> (Kebutuhan oksigen biokimia)	Rp 50.000,00/pengujian
8	COD (Kebutuhan oksigen kimiawi)	Rp 67.500,00/pengujian
9	Mn (Mangan)	Rp 55.000,00/pengujian
10	Pb (Timbal)	Rp 62.500,00/pengujian
11	Cu (Tembaga)	Rp 62.500,00/pengujian
12	Fe (Besi)	Rp 55.000,00/pengujian
13	Cd (Kadmium)	Rp 50.000,00/pengujian
14	Minyak dan lemak	Rp 52.500,00/pengujian

15	Nitrogen Total (sebagai N)	Rp 55.000,00/pengujian
16	Amoniak Total (sebagai NH <sub>3</sub> N)	Rp 40.000,00/pengujian
17	Hg (Merkuri/raksa)	Rp 87.500,00/pengujian
18	As (Arsen)	Rp 87.500,00/pengujian
19	Cr (Krom)	Rp 50.000,00/pengujian
20	Fenol	Rp 52.500,00/pengujian
21	PO <sub>4</sub> (Fosfat)	Rp 50.000,00/pengujian
22	NO <sub>3</sub> N (Nitrat)	Rp 50.000,00/pengujian
23	NO <sub>2</sub> N(Nitrit)	Rp 42.500,00/pengujian
24	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (Sulfat)	Rp 50.000,00/pengujian
25	H <sub>2</sub> S (Sulfida)	Rp 41.250,00/pengujian
26	E.coli	Rp 85.000,00/pengujian
27	Total Coliform	Rp 82.500,00/pengujian
28	CN (Sianida)	Rp 42.500,00/pengujian
29	Ni (Nikel)	Rp 50.000,00/pengujian
30	Zn (Seng)	Rp 50.000,00/pengujian

**B. Tarif Pengukuran Kualitas Udara**

1	Suhu	Rp 10.000,00/pengujian
2	Kelembaban	Rp 10.000,00/pengujian
3	Arah dan Kecepatan Angin	Rp 10.000,00/pengujian
4	NO <sub>x</sub> (Nitrogen oksida)	Rp 120.000,00/pengujian
5	SO <sub>x</sub> (Sulfur oksida)	Rp 120.000,00/pengujian
6	H <sub>2</sub> S (Hidrogen sulfide)	Rp 120.000,00/pengujian

7	NH <sub>3</sub> (Amonia)	Rp 130.000,00/pengujian
8	Kebisingan (sesaat)	Rp 30.000,00/pengujian
9	Kebisingan ( 24 jam)	Rp 159.000,00/pengujian
10	CO (Karbon monoksida)	Rp 125.000,00/pengujian
11	O <sub>3</sub> ( Ozon )	Rp 120.000,00/pengujian
12	Debu TSP (Total partikel tersuspensi)	Rp 92.500,00/pengujian
13	Debu PM <sub>10</sub> (partikel < 10mm)	Rp 156.500,00/pengujian
14	Debu PM <sub>2,5</sub> (partikel < 2,5mm)	Rp 156.500,00/pengujian
<b>C. Tarif Pemeriksaan Tanah</b>		
1	Tekstur :	Rp 75.000,00/pengujian
	- Pasir	
	- Debu	
	- Liat	
2	Ph	Rp 17.500,00/pengujian
3	Fe (Besi)	Rp 55.000,00/pengujian
4	Zn (Seng)	Rp 50.000,00/pengujian
5	Pb (Timbal)	Rp 62.500,00/pengujian
6	Cd (Cadmium)	Rp 50.000,00/pengujian
7	Cu (Cuprum)	Rp

		50.000,00/pengujian
8	Permeabilitas	Rp 30.000,00/pengujian
9	Kelèmbaban	Rp 30.000,00/pengujian
10	N (Nitrogen)	Rp 52.500,00/pengujian
11	P (Phosfat)	Rp 50.000,00/pengujian
12	K (Kalium)	Rp 50.000,00/pengujian
D. Tarif Pemusnahan Limbah Medis Padat dengan Menggunakan Incenerator		
1	Limbah Medis Padat	Rp 65.000,00/kg

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Wilayah pemungutan adalah di laboratorium lingkungan.

BAB VIII

PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

### BAB XIII

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

##### KETENTUAN PIDANA

###### Pasal 18

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### BAB XV

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Mei 2016.

BUPATI TABALONG,

*ffd*

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

*ffd*

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN  
2016 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (58/2016)